PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.**
Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.Ikom**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	Pihak Pertama, Plt. SEKRETARIS DAERAH,
H. AGUSTIAR SABRAN, S.Ikom	**Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.** NIP. 196603151992031010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,50
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,63
		Nilai SAKIP	Nilai	73,50
2.	Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui meditasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Kasus	16
3.	Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat	Efektifnya pelaksanaan pengendalian inflasi	Aduan	70
		Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD	%	70
		Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang disiapkan	%	70
		Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,32
4.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	92
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam fungsi pemerintahan umum serta administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan	Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi	Dokumen	2
		Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi	Dokumen	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6.	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya program pembentukan produk hukum pengaturan dan penetapan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71,25
		Persentase terlaksananya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah	%	100

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Organisasi	Rp.	110.000.000	Biro Organisasi
2.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.	737.372.000	Biro Hukum
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	324.972.496	Biro Perekonomian
4.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp.	147.608.644.026,27	Biro Kesejahteraan Rakyat
5.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.	997.755.052	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	396.765.952	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.	213.956.000	Biro Administrasi Pembangunan
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	122.485.607.196,79	Biro Umum
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	3.940.740.797,75	Biro Administrasi Pimpinan

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. AGUSTIAR SABRAN, S.Ikom

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
NIP. 196603151992031010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).